

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, setiap Negara senantiasa menggunakan Partai Politik yang didukung dengan sistem politik suatu Negara, yang tidak akan dapat dilepaskan dari sistem dan bentuk pemerintahan yang dianut oleh Negara yang bersangkutan, karena untuk menentukan bentuk dan susunan pemerintahan dalam suatu Negara yang merupakan cerminan suatu Negara adalah sistem politik suatu Negara yang bersumber dari partai politik yang ada.

Dalam sistem demokrasi, eksistensi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan sebuah keniscayaan. Upaya demokratisasi membutuhkan sarana atau pun saran dari Partai Politik dengan melihat kebutuhan masyarakat dalam suatu Negara. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu sarana yang memiliki ragam fungsi, *platform* (program partai) dan dasar pemikiran. Fungsi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) salah satu bisa dijadikan sebagai pertimbangan, sehingga dapat tercapai pemerintahan yang demokratis.

Dalam perkembangannya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dianggap media yang dapat mewakili untuk berpartisipasi dalam rangka menentukan kebijakan (*policy*) melalui sistem ketatanegaraan yang diberikan pemerintah kepada warga negara untuk mendirikan partai politik.

Posisi dan peranan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai Partai Politik dalam proses interaksi antara Negara dengan rakyat dalam mengawasi supaya Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan semestinya sehingga dapat terwujud masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Menurut Howlett dalam Koirudin (2004:67), menyatakan masyarakat modern adalah yang memandang politik tidak lagi sebatas keyakinan semata. Masyarakat modern lebih melihat politik sebagai proses aktualisasi diri dan kepentingan mereka yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan publik.

Dalam hal ini partisipasi masyarakat menjadi satu kunci dalam menilai bagaimana kualitas dari lembaga-lembaga sosial politik yang ada dalam masyarakat Indonesia. Pada dasarnya masyarakat saat ini sudah cukup cerdas dan juga akses untuk mendapatkan informasi untuk mengetahui perubahan-perubahan itu sudah sangat terbuka lebar, sehingga masyarakat Indonesia sudah mengetahui partisipasi dalam berjalannya suatu proses politik suatu Negara.

Dilihat dari sistem politik, revolusi membawa tuntutan yang besar kepada perubahan sistem dan kehidupan politik Indonesia, karena pada saat itu masyarakat sendiri masih mempunyai kapasitas yang cukup relatif rendah untuk bisa memahami segala bentuk perubahan dalam suatu pemerintahan.

Menurut Surbakti, dalam tim dosen mata kuliah dasar – dasar ilmu politik, (2008 : 143) mengatakan :

Bahwa partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun.

Dengan demikian bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Beragam pendapat didalam masyarakat akan melahirkan keinginan untuk membentuk suatu partai sesuai dengan ragam pendapat yang hidup.

Perlu diketahui bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga memiliki beberapa fungsi, salah satunya pada fungsi input, dimana setiap partai menjadi sarana sosialisasi politik, komunikasi politik, agregasi kepentingan, dan artikulasi kepentingan.

Menurut Easton, dalam Budiardjo (2004), terdapat tiga proses yang menjadi saluran bagi terselenggaranya sebuah sistem, yaitu *input*, *process*, dan *output*. *input* terdiri dari tuntutan dan dukungan yang datang dari masyarakat, *process* yang tidak lain adalah proses pembuatan kebijakan, dan *output* yang berhubungan dengan proses pelaksanaan kebijakan.

Dalam hal ini bisa diartikan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan saluran bagi sebuah sistem politik yang terdiri dari tuntutan maupun dukungan dari masyarakat. Sehingga Partai ini sendiri dapat mendukung pelaksanaan pemerintahan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik (*policy public*).

Berdasarkan dari pemikiran di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap peranan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kemudian diangkat menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul “ Peranan Partai Politik dalam Mendukung Pelaksanaan Pemerintahan pada Proses Pembuatan dan

Pelaksanaan Kebijakan Publik (studi kasus DPD Partai Keadilan Sejahtera kota Medan).

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan penelitian dalam bidang apa saja. Menurut Sugiyono (2010:385), “Identifikasi masalah adalah melakukan studi pendahuluan ke objek yang diteliti, melakukan observasi dan wawancara ke berbagai sumber, sehingga permasalahannya dapat diidentifikasi”.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Peranan Partai Keadilan Sejahtera dalam proses pembuatan kebijakan publik di Kota Medan.
2. Peranan Partai Keadilan Sejahtera dalam proses pelaksanaan kebijakan publik di Kota Medan.
3. Perilaku politik yang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan demokrasi
4. Rendahnya tingkat kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat terhadap aktor politik dan pemerintahan
5. Rendahnya intensitas kaderisasi dan proses rekrutmen aktor politik oleh parpol yang tidak mengedepankan kompetensi politik

C. Pembatasan Masalah

Menurut Sugiyono (2010:385), “Batasan masalah adalah membatasi ruang lingkup yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian lebih dapat fokus untuk dilakukan, serta meneliti antara variabel yang satu dan yang lain”.

Sesuai dengan masalah penelitian yang diidentifikasi di atas, berikut ini peneliti merumuskan pembatasan masalah penelitian. Adapaun maksudnya agar permasalahan yang diteliti menjadi jelas, terarah dan tidak terlalu luas, sehingga dapat dihindari salah pengertian tentang masalah penelitian. Maka pembatasan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Peranan Partai Keadilan Sejahtera dalam proses pembuatan kebijakan publik di Kota Medan.
2. Peranan Partai Keadilan Sejahtera dalam proses pelaksanaan kebijakan publik di Kota Medan.

D. Rumusan Masalah

Didalam sebuah penelitian perlu ditegaskan dan dirumuskan masalah yang akan diteliti. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2000:19), “Agar penelitian dapat dicapai dengan sebaik-baiknya, peneliti harus merumuskan masalahnya sehingga jelas dari mana harus memulainya, kemana harus pergi dan dengan apa”.

Berdasarkan pendapat di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Partai Keadilan Sejahtera dalam proses pembuatan kebijakan publik di Kota Meda?

2. Bagaimana peranan Partai Keadilan Sejahtera dalam proses pelaksanaan kebijakan publik di Kota Medan?

E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui maksud dari suatu penelitian, maka perlu adanya tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2010:386), “Tujuan penelitian adalah untuk melakukan penelitian atau tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang dituliskan. Jawaban dari tujuan penelitian dapat dilihat/diperoleh dalam kesimpulan dan saran”.

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

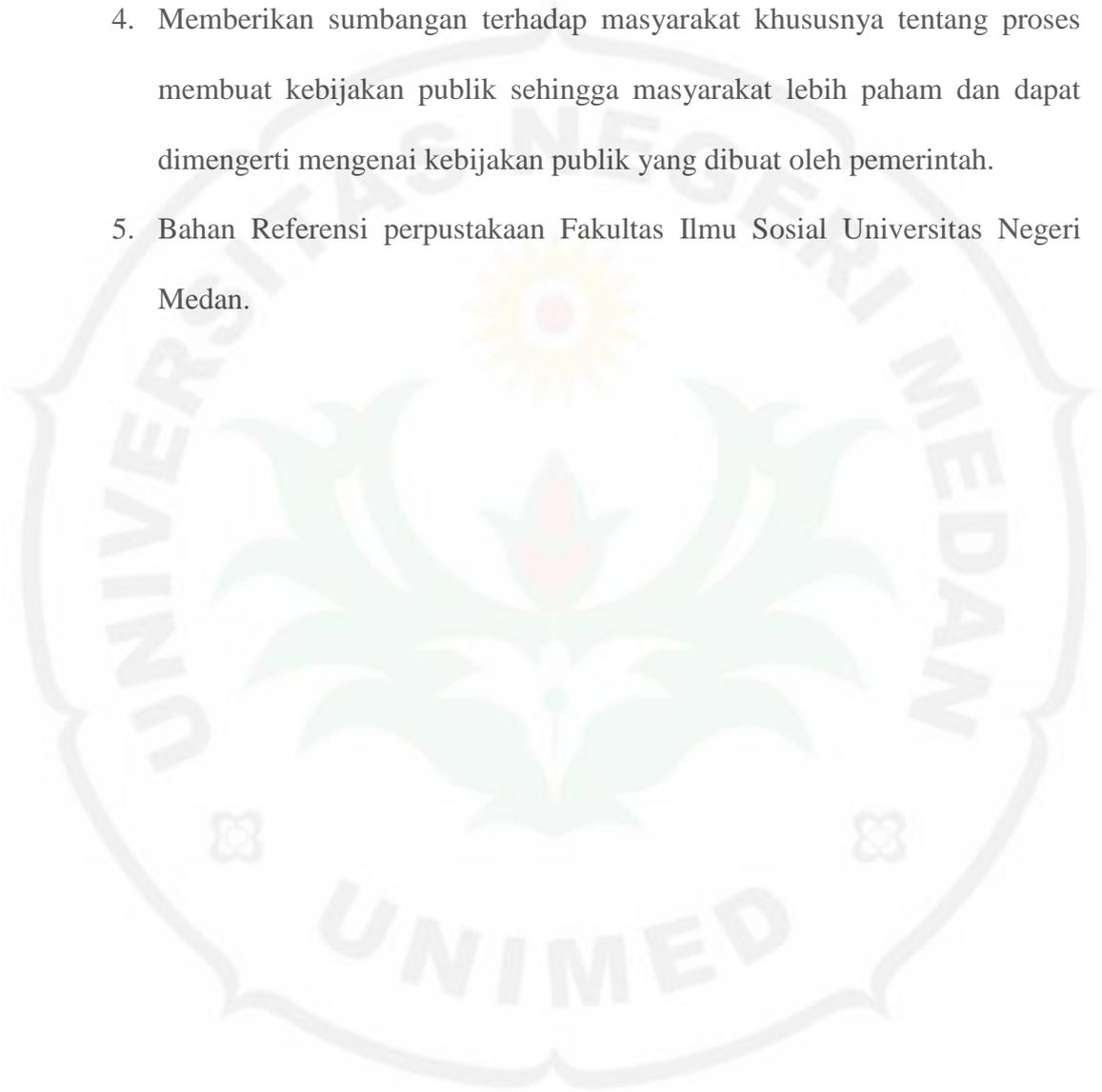
1. Untuk mengetahui peranan Partai Keadilan Sejahtera dalam proses pembuatan kebijakan publik di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui peranan Partai keadilan Sejahtera dalam proses pelaksanaan kebijakan publik di Kota Medan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk dijadikan bahan masukan kepada Partai Keadilan Sejahtera maupun pemerintah dalam rangka membuat kebijakan publik kepada masyarakat.
2. Untuk menjadi masukan kepada mahasiswa dalam meneliti masalah yang sama pada lokasi yang berbeda.
3. Menambah wawasan penulis tentang peranan Partai Keadilan Sejahtera dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik.

4. Memberikan sumbangan terhadap masyarakat khususnya tentang proses membuat kebijakan publik sehingga masyarakat lebih paham dan dapat dimengerti mengenai kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah.
5. Bahan Referensi perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.



THE
Character Building
UNIVERSITY